

SKRIPSI

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA JENETALLASA
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diusulkan Oleh:

Zulfadli Harjun
Nomor Stambuk; 10561 04991 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA JENETALLASA KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

ZULFADLI HARJUN

Nomor Stambuk: 10561 04991 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa Dalam pembangunan Infrastruktur Di
Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga
Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : ZulFadli Harjun

NIM : 10561 04991 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Anwar Parawangi, M.Si


Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ZulFadli Harjun

Nomor Stambuk : 10561 0499 114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 04 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

ZulFadli Harjun

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ZulFadli Harjun

Nomor Stambuk : 10561 0499 114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 04 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



ZulFadli Harjun

ABSTRAK

ZULFADLI HARJUN. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, (dibimbing oleh Anwar Parawangi dan Hafiz Elfiansya parawu)

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas untuk mengawasi segala pembangunan dan program yang ada, Namun kenyataan yang terjadi di Desa Jenetallasa pengawasan pembangunan oleh BPD dinilai oleh masyarakat setempat masih lemah, dimana anggota BPD belum secara aktif mengawasi proyek pembangunan yang sedang berjalan di Desa Jenetallasa sehingga ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang terkendala penyelesaiannya seperti pekerjaan drainase di Dusun Jenetallasa dan pembangunan rabat beton di Dusun cambayya (wawancara), yang juga diperkuat oleh absensi kehadiran anggota BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik di Desa Jenetallasa kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa data pembangunan infrastruktur yang belum selesai juga didapatkan peneliti dari hasil RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa tahun 2018. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memilih orang tertentu yang memiliki pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan harus dilakukan berdasarkan aturan dan indikator yang telah ada dan juga faktor penghambat dari pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta kesadaran dari pengawas itu sendiri.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Faktor Penghambat*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing I dan Ayahanda Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Harrang dan ibunda Junaeda yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
5. Buat saudara-saudaraku tercinta Hasnawati, Hajra, dan yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
7. Kepada seluruh pihak informan di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Buat teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 014, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini yang telah banyak membantu, memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis. Oni hermawan, Edy Rahmat, zulkifli S.Sos, Ical haedar, Agus prianto, Reski nurbani anto, sri wulandari S.Sos, Nurul Namirah, Sitti hasana dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 04 Agustus 2019

Penulis,



ZulFadli Harjun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian	5
A. Tujuan Penelitian	5
B. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Konsep Definisi Dan Teori.....	6
1. Konsep Manajemen	6
2. Konsep Pengawasan	7
1) Jenis-jenis pengawasan	9
2) Teknik-teknik pengawasan.....	11
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan	15

4) Kendala-kendala dalam pengawasan	15
5) Maksud dan tujuan pengawasan.....	16
3. Definisi pembangunan	17
1. Tujuan pembangunan	22
4. Tinjauan tentang Infrastruktur	25
5. BPD	27
1) Tugas Dan Wewenang BPD.....	27
2) Tujuan BPD.....	28
B. Kerangka fikir	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Deskripsi fokus penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	33
B. Jenis dan tipe penelitian.....	33
C. Sumber data	33
D. Informan penelitian.....	34
E. Teknik pengumpulan data.....	35
F. Teknik analisis data	36
G. Pengabsahan data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi objek penelitian	40
1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	40
2. Visi dan Misi	41

3. Tugas dan fungsi BPD.....	42
4. Struktur organisasi.....	43
B. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	44
A. Teknik pemantauan.....	45
B. Teknik pemeriksaan	55
C. Teknik penilaian	59
D. Faktor penghambat pembangunan infrastruktur pada Desa Jeneteallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	63
E. Faktor pendukung pembangunan infrastruktur pada Desa Jeneteallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
2.1	Informan Penelitian	35



DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.1	Bagan kerangka pikir	30
1.2	analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman	38
1.3	struktur organisasi BPD	44



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tujuan pembangunan untuk menciptakan kemajuan pada bidang sosial dan ekonomi yang berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu hal penting dalam suatu pembangunan adalah pembangunan pada bidang fisik dan sosial, hal ini dapat terwujud dengan perbaikan fasilitas infrastruktur yang ada. Karena infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah, seperti halnya infrastruktur jalan merupakan modernisasi bangsa yang salah satu fungsinya sebagai aspek penting dalam peningkatan kelancaran produktivitas dalam sektor produksi dan yang tak kalah pentingnya infrastruktur jalan ini dapat membantu dan meningkatkan serta menciptakan akses transportasi masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, pembangunan nasional yang dimaksud merupakan suatu langkah untuk membangun manusia Indonesia. Artinya setiap kebijakan yang diambil yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan haruslah merata keseluruhan wilayah Indonesia dan dilakukan demi kepentingan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat berdampak pada perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Perpres nomor 75 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas menyatakan bahwa pembangunan skala prioritas haruslah dilaksanakan sesegera mungkin, guna demi kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan disini salah satunya adalah, infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan.

Dewasa ini pembangunan infrastruktur sangat penting agar kiranya lebih diperhatikan, terutama pada daerah-daerah pedesaan yang masih sangat minim sarana dan prasarana infrastrukturnya, namun yang terjadi saat ini pembangunan infrastruktur masih banyak mengalami kendala-kendala karena masih minimnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat pedesaan terkait dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan pembangunan masih mengalami beberapa kekurangan salah satunya yaitu dalam hal penetapan waktu pengerjaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, artinya bahwa pembangunan Desa disini berfungsi sebagai penunjang untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Pada pembangunan infrastruktur Desa Jenetallasa masih banyak masyarakat di sana yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa serta kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pengawasan serta

evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Jenetallasa mengalami beberapa permasalahan seperti pembangunan yang belum terkelolah serta pembangunan yang lewat dari jangka waktu yang telah ditetapkan.

dalam Peraturan Desa (PERDES) Jenetallasa nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2018, dijelaskan bahwa strategi pembangunan Desa yang partisipatif yang diharapkan agar masyarakat benar-benar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Strategi ini dimaksudkan agar masyarakat baik program maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingan-kepentingannya baik perorangan maupun kelompok dapat diakomodasikan dalam pengambilan kebijakan publik.

Dikutip dari Pontianak Post (Oktober 2016), menuliskan bahwa di tengah gencar-gencar pemerintah membangun infrastruktur ternyata masih banyak wilayah di Kalimantan Barat yang belum tersentuh pembangunan. Salah satunya Kecamatan Hulu Sungai di Kabupaten Ketapang. Ini merupakan Kecamatan nomor dua terluas (4.685 km² atau 14,83 persen) dari 20 kecamatan lainnya di kabupaten tersebut. Di kecamatan tersebut masih banyak Desa yang masih terkendala akses jalan. Kemudian kondisi yang miris juga dari sisi penerangan. Menurutnya hampir seluruh wilayah kecamatan tidak ada pelayanan PLN. Begitu juga dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat minim sekali. Kondisi tentulah begitu miris, warga sangat mendambakan daerah mereka segera

dibangun. Selama ini, mereka sudah merasakan hidup dengan segala keterbatasan. Padahal, Indonesia sudah 73 tahun merdeka. Namun tetap saja Kecamatan Hulu Sungai sangat minim sentuhan pembangunan. Harapan mereka ada pemerataan pembangunan. Sehingga daerah mereka ini juga bisa merasakan pembangunan.

Kendati demikian kondisi yang berbeda pada sumber daya alam (SDA). Kekayaan sumber daya alam di kecamatan ini berlimpah. Hutan pada daerah tersebut merupakan yang terluas di Kabupaten Ketapang. Belum lagi areal perkebunan kelapa sawit serta potensi bahan pertambangan emas dan bauksit.

Kemudian tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai parlemen di Desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 61 tentang Desa, adalah selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD juga bertugas untuk mengawasi pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan di Desa. Namun kenyataan yang terjadi di Desa Jenetallasa pengawasan pembangunan oleh BPD dinilai oleh masyarakat setempat masih lemah, dimana anggota BPD belum secara aktif mengawasi proyek pembangunan yang sedang berjalan di Desa Jenetallasa sehingga ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang terkendala penyelesaiannya seperti pekerjaan drainase di Dusun Jenetallasa dan pembangunan paving blok di Dusun cambayya (wawancara), yang juga diperkuat oleh absensi kehadiran anggota BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik di Desa Jenetallasa kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa data pembangunan infrastruktur yang belum selesai juga didapatkan peneliti dari hasil RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa tahun 2018.

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?
2. Apakah faktor determinan pembangunan infrastruktur pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor determinan dari pembangunan infrastruktur pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara praktis penelitian ini nantinya di harapkan dapat bermanfaat terhadap pembangunan kedepannya terkait dengan pembangunan infrastruktur Desa bagi pemerintah daerah, hasil studi ini dapat memberikan gambaran terhadap fungsi pengawasan dalam pembangunan inrastruktur Desa, sehingga dapat dijadikan masukan pembangunan kedepannya guna menciptakan efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep, Definisi dan Teori

1. Konsep Manajemen

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa manajemen adalah sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Pendapat ini berkembang berdasar kenyataan bahwa pemimpin mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan, tanpa harus melakukan pekerjaan sendiri. Manajemen merupakan spesifik yang mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang lebih efektif, berorientasi pada tujuan, dan produktif.

Kemudian menurut Robbins Dan Coulter (wibowo:2014) manajemen adalah koordinasi dan pengawasan aktivitas pekerjaan orang lain sehingga aktivitas mereka diselesaikan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Manajemen* adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry, dibedakan menjadi 4 yang biasa disingkat dengan POAC (Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling).

1. Planing (Perencanaan)

Merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari proses manajemen karena pada tahap ini disusun berbagai aktivitas organisasi ke depannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Adalah suatu kegiatan pembagian tugas kepada setiap sumber daya yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya tersebut.

3. Actuating (mengarahkan)

Mengarahkan seluruh anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan perusahaan.

4. Controlling (Pengawasan)

Kegiatan untuk memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan, dan dikoordinasikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu.

2. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dapat memperoleh hasil yang telah ditetapkan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai

program kelembagaan sehingga dapat memberikan memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan di dalam kelembagaan, menurut (Makmur,2013:175): a. Kelembagaan dari segi perencanaan tidak tepat sasaran yang hendak dituju; b. Pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaanya; c.pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Pengertian pengawasan menurut siagian (2016:176) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya . pengawasan sering diartikan sebagaimana definisi berikut :

Murhaini (2014:4) pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Selanjutnya menurut Fahmi (2012:138) pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi menerangkan kinerja yang efektif dan efisien, dan juga lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Sedangkan, menurut Huda (2016:7) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki dan mencegah terulang kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak jauh

berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan dalam pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan dalam proses kegiatan itu dilakukan sebelum terjadinya kesalahan. Apabila dalam tindakan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Adanya pengawasan preventif yang dimaksud untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Prosedur yang telah ditetapkan berarti pengawasan preventif telah dijangkau. Maksud lain dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan, sistem pelaksanaan anggaran pengawasan preventif disebut per audit.

1) Jenis-jenis pengawasan

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan sebagai bentuk pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan dalam maksud upaya-upaya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Hal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

1. Membuat peraturan berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan yang dibuat dalam tata tertib

2. Membuat pedoman-pedoman kerja
3. Menetapkan sangsi-sangsi pembuat permasalahan
4. Menentukan kedudukan tugas , wewenang dan tanggung jawab,
5. Mengorganisasikan segala kegiatan
6. Menentukan system koordinasi laporan dan kegiatan

b. Pengawasan Represif

Adalah pengawan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan kerjaan. Maksud diadakan pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan juga pada saat terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud agar kesalahan tidak terulang kembali, sehingga sasaran yang direncanakan dapat dicapai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengawasan represif itu ;

1. Membandingkan antara hasil-hasil suatu kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan,
2. Mencari penyebab-penyebab penyimpangan, kemudian mencari jalan keluar,
3. Memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan , termasuk kegiatan para penanggung jawab
4. Melaksanakan sangsi yang telah ditentukan terhadap yang melakukan kesalahan
5. Menilai kembali prosedur – prosedur yang telah ditentukan,
6. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksana

2) Teknik-teknik pengawasan

Efektifnya suatu pengawasan dapat tercapai apabila digunakan metode yang tepat. Melaksanakan pengawasan dapat dilakukan teknik pengawasan, Soelistriyo (2016:11) menggunakan teknik pengawasan terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja yaitu dengan dilakukannya pengawasan secara langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mendefinisikan dan memperbaiki dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi langsung mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sering dilakukan, yaitu dengan mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dilakukan tadi. Tujuannya yaitu agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang mungkin terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Pengawasan sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas pimpinan dan bawahannya rendah. Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan dilakukan dengan menguji, meneliti laporan laporan pelaksanaan kerja dan mempelajari pendapat masyarakat. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan dan memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. Untuk menentukan

efektifitas dalam pengawasan diperlukan teknik-teknik pengawasan yang maksimal dalam melakukan pengawasan dilapangan. Adapun teknik-teknik pengawasan menurut Makmur (2013:193) yaitu;

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada pemerintah yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang terlihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang telah kita rencanakan diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tehniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan suatu kebenaran, tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Semuanya telah memaklumi bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula

memberikan keyakinan terhadap pihak lain atas pengawasan yang dilakukan itu. Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan subjektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran.

3. Teknik penilaian dalam pengawasan, bagaimana menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan, apakah itu dilakukan berdasarkan dengan kebenaran atau dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian sebagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan dengan cara yang tepat, adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik undur pelaksanaan kegiatan, maupun oknum pengawasan yang paling penting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan, baik dalam bidang pemerintahan atau publik maupun di bidang swasta atau privat, karena penilaian ini dapat dilakukan secara objektif, maupun secara subjektif yang relatif menentukan adalah ketepatan teknik yang digunakan.
4. Teknik wawancara dalam pengawasan, wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam bidang pengawasan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawasan menentukan suatu keyakinan kebenaran suatu pelaksanaan kegiatan apakah benar dalam kebenaran ataukah benar dalam kesalahan. Tujuan wawancara untuk memperoleh suatu data informasi, tetapi perlu diberikan bahwa orang

yang diwawancarai belum tentu memberikan informasi yang benar, oleh sebab itu diperlukan teknik yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran.

5. Teknik pengamatan dan pengawasan. Selain teknik wawancara dalam pengawasan tersebut diatas, antara suatu teknik pengawasan adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya, baik dengan yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang terikat dalam sebuah kelembagaan. Pengamatan bukan jaminan untuk mendapatkan suatu kebenaran karena apa yang diamati atau apa yang dilihat, didengar, atau yang semacamnya belum tentu itulah hakikat kebenarannya, oleh sebab itu diperlukan teknik yang tepat dalam sebuah pengawasan.

Komitmen akan mengidentifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan yaitu suatu kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan indentifikasi terhadap nilai-nilai tujuan organisasi. Disamping komitmen karyawan mengandung pengertian suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang melainkan mengisyaratkan hubungan pegawai dengan perusahaan secara aktif. Karena pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menunjang kesejahteraan pengawasan.

3) Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Menurut Abdurrahman (Syafiie,2011:110) ada beberapa faktor yang dapat membantu pengawasan dan mencegah dari berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, antara lain:

1. Filsafat yang dianut oleh suatu bangsa
2. Agama yang mendasar pada seseorang
3. Kebijakan yang dilakukan
4. Anggaran pembiayaan mendukung
5. Penempatan pegawai serta prosedur kerja
6. Kemantapan koordinasi terhadap organisasi.

Berdasarkan yang dikemukakan di atas, bahwa dalam pengawasan memerlukan pemikiran-pemikiran yang sudah menjadi hal terbiasa dilingkungan tersebut. Menanamkan rasa keyakinan seseorang dalam beragama agar seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dan menjalankan perintahnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas persoalan atau pekerjaan tersebut. Karena setiap perbuatan yang dilakukan akan disegani dengan mempercayai dan meyakini bahwasannya setiap pekerjaan selalu diamati dan diperhatikan.

4) Kendala-kendala dalam pengawasan

Menurut Mardismo (2016:18), kendala-kendala dalam melakukan pengawasan sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia

Dengan terbatasnya jumlah pegawai terutama pejabat fungsional sehingga yang melakukan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh seluruh staf.

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tidak lagi melihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal.

2. Sarana Dan Prasarana

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu kendala dalam pengawasan. Padahal wilayah kabupaten sangat luas dan masih banyak daerah yang masih jauh dari pusat Kabupaten.

5) Maksud Dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu tujuan pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian tujuan. Menurut Asnawir, (2015:9) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan – kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planing* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planing*, yaitu standar.

Sedangkan Situmorang (2015) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh segala sesuatu sistem manajemen pemerintah yang bedaya guna dan berhasil serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dalam wujud pengawasan masyarakat (control social) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab
2. Agar terselenggranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.

3. Definisi pembangunan

Menurut Afiffuddin dalam bukunya *pengantar administrasi pembangunan*.

Pembangunan dalam konteks yang luas mempunyai beberapa pengertian :

1. Pembangunan adalah perubahan

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dari cangkupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi

kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik.

2. Pembangunan adalah pertumbuhan

Yang dimaksud dari pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara filsafat dapat dikatakan bahwa suatu organisme – suatu negara dapat dikatakan sebagai suatu organisme (Pamudji,S.:1989). Karena suatu negara dipandang sebagai suatu organisme , maka logis pulalah apabila pembangunan.

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan.

Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlansung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apabila secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Satu kondisi ideal yang merupakan salah satu sasaran pembangunan ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok kelompok tertentu dalam masyarakat.

4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi.

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi apaun tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan – kegiatan perencanaan. penelitian yang amat kausal menunjukan bahwa dalam semua literatur tentang administrasi dan manajemen, pasti akan terlihat adanya kesepakatan para ahli untuk mengatakan bahwa perencanaan tidak bisa tidak harus dilakukan dalam rangka usaha pencapaian tujuan organisasi.

5. Pembangunan adalah cita cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa

Pada umumnya, komponen – komponen dari cita cita akhir dari negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolut” yang setelah tercapai tidak mungkin dapat ditingkatkan lagi seperti :

- a) Keadilan sosial
- b) Kemakmuran yang merata
- c) Perlakuan yang sama dimata hukum
- d) Kesejahteraan material, mental dan spiritual
- e) Kebahagiaan untuk semua
- f) Ketentraman
- g) Keamanan.

Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan*. Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation-Building*). apabila definisi sederhana itu disimak secara cermat maka akan muncul ke permukaan paling sedikit tujuh ide pokok :

1. Pembangunan merupakan suatu proses.

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*Never Ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai pembangunan.

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang maupun pendek.

Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.

Pertumbuhan yang dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.

5. Pembangunan mengarah kepada moderinitas.

Moderinitasi di sini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa konsep moderinitas tidak identik dengan “cara hidup gaya barat”. Setiap negara bangsa yang modern tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai – nilai yang dipandang oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh.

6. Moderinitas yang ingin diacapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multi dimensional.

Artinya moderinitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

7. Semua yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

1. Tujuan Pembangunan

Adisasmita, 2013:35 mengemukakan beberapa bagian penting dalam suatu aspek pembangunan antara lain adalah :

1. Pembangunan ekonomi

Menekankan terhadap usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam segala hal kegiatan ekonomi potensial, menaikkan potensian produktifitas pertanian dan non pertanian. Meningkatnya efisiensi dan pertumbuhan industri pada sektor-sektor pelayanan publik secara menyeluruh.

2. Pembangunan lingkungan

Menjaga keseimbangan ekologi serta menciptakan kondisi lingkungan yang alamiah ramah dan bersahabat.

3. Pembangunan kelembangaan

Mendorong partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administratif , desentralisasi dan mobilisasi , sumber daya dan penguatan lembaga.

4. Pembangunan fisik dan sosial

Memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan serta pengembangan keahlian pekerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.

Menimbang tentang begitu banyak aspek yang harus dibangun, maka seringkali pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahapan dalam pembangunan ini tidak dapat disesuaikan dalam skala prioritas. Pembangunan tersebut menyangkut tentang kepentingan yang harus didahulukan.

Adapun tujuan pembangunan Indonesia tersebut, terdapat dalam undang undang dasar 1945 :

1. Melindungi segenap bangsa dan tumpah dara Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan tersebut dapat dilihat bukan hanya pembangunan fisik saja melainkan juga non fisik, sebagai contoh mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan infrastruktur berupa sekolah dpat membantu anak-anak bangsa untuk belajar guna mencapai salah satu dari tujuan pembangunan yaitu

mencerdaskan kehidupan bangsa, agar kehidupan bangsa kedepannya tidak mengalami keterbelakangan akibat kurangnya wadah untuk mereka belajar.

Pada umumnya tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah direncanakan selama ini agar dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama, peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dan pembangunan, dimana dalam pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan serta pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah cita-cita yang lebih baik.

Selanjutnya menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang lebih tinggi yaitu modernisasi, dimana variabel-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik.

Dan menurut Roger (Agus Suryono 2001:132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat

yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun pembangunan fisik yang diartikan sebagai alata atau fasilitas yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat adalah :

1. Prasarana perhubungan berupa jalan, jembatan, dll.
2. Prasarana pemasaran seperti gedung dan pasar
3. Prasarana sosial yaitu gedung sekolah, rumah ibadah dan puskesmas
4. Prasarana produksi saluran air.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan merupakan proses kearah yang lebih baik, namun hanya akan terwujud jika menggerakkan manusianya, melibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya.

4. Tinjauan Tentang Infrastruktur

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Menurut mankiw(2003), Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *publik capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem

sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie, 2005).

Kemudian Mankiw (2003) menyatakan bahwa pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik. Hal serupa juga dijelaskan dalam Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula dalam kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengelolaan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi, dan utilitas publik.

5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan permusyawaratan Desa atau yang biasa kita singkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD dapat disebut sebagai parlemen di Desa, BPD adalah suatu lembaga yang baru di Desa pada masa otonomi Daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk Desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lain.

Peresmian anggota BPD dikukuhkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang mana sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Masa jabatan dari anggota BPD ini yaitu 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada periode berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan rangkap jabatan sebagai kepala Desa atau perangkat Desa.

1) Tugas Dan Wewenang BPD

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang dari BPD adalah :

- A. Membahas dan membuat rancangan peraturan di Desa dengan kepala Desa
- B. Melakukan pengawasan kepada pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa
- C. Ikut serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Desa
- D. Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa

- E. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa, didalam melakukan pemilihan kepada Desa, BPPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala Desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- F. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat di Desa
- G. Memberikan persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat Desa
- H. Membuat susunan tata tertib BPD
- I. Semua aspirasi dari penduduk Desa khususnya pada bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik
- J. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD kepada pemerintahan Desa dan masyarakat, harus dijaga supaya kepercayaan dan dukungan tetap ada, sehingga kepala Desa selalu dan bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab.

2) Tujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Tujuan dari pembentukan BPD adalah :

- A. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat agar bagaimana mereka dalam bertindak laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

- B. Menjaga masyarakat agar tetah utuh
- C. Memberikan pedoman pada masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial. Seperti sistem pengawasan masyarakat kepada tingkah laku anggotanya
- D. Sebagai tempat demokrasi di Desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

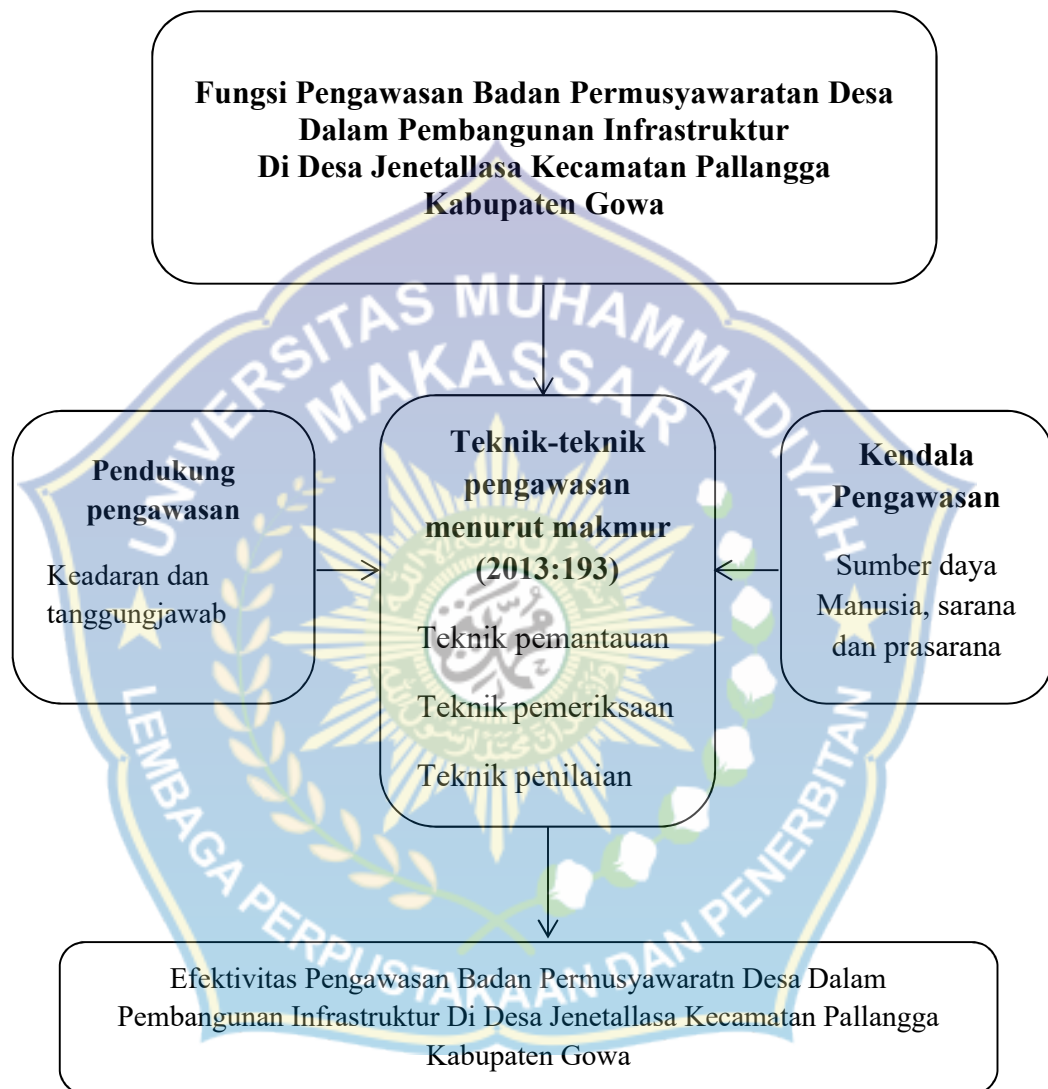
B. Kerangka pikir

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Jenetallasa kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang bertugas sebagai pengawas selama pembangunan Infrastruktur itu berlansung adalah Badan permusyawaratan Desa (BPD). Dalam melaksanakan pengawasan BPD bertugas mealakukan pemantauan, pemeriksaan, serta penilaian terhadap pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dan tim pelaksana kegiatan Desa (TPK dan TPKD). Dalam melaksanakan pembangunan, anggaran yang mendukung sangatlah diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan.

Pengawasan merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan karena dengan tanpa adanya pengawasan maka pembangunan disuatu daerah akan mengalami penyimpangan baik dari segi anggaran maupun dari segi kualitas pembangunan itu sendiri, maka dari itu pengawasan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tersebut. Namun pengawasan akan menjadi lemaah Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang melakukan pengawasan . Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tidak lagi melihat

dari tingkat kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



C. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana fungsi pengawasan badan permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan kejelasan dalam pengertian terkait objek penelitian, maka diuraikan definisi fokus dari penelitian sebagai berikut :

1. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh BPD Desa Jenetallasa kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya kesalahan dan juga kecurangan yang terjadi dalam sebuah pembangunan. BPD dalam segi fungsi dasar manajemen, ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. BPD daerah sebagai aparat “pengawasan interal” pemerintah berperan sebagai quality assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat dari pelaksanaan tugas pengawasan adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.
2. Pemantauan yang dilakukan oleh BPD Desa Jenetallasa kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dalam hal pembangunan infrastruktur adalah mengamati perkembangan dari pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD Desa Jenetallasa kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa melibatkan perangat Desa serta masyarakat guna untuk

mengetahui apa saja yang kurang dan apa saja yang memerlukan perbaikan dalam suatu pembangunan, agar pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan keinginan masyarakat.

4. Penilaian yang dilakukan oleh BPD Desa Jenetallasa kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa haruslah tepat , adil dan jujur karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik untuk pelaksanaan kegiatan, maupun oknum pengawasan yang paling penting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan, baaik dalam bidang pemerintahan atau publik.
5. Kesadaran dan tanggung jawab merupakan suatu sifat yang wajib ditanamkan dalam diri tiap individu, agar apa yang ingin dicapai dapat terealisasikan dengan baik tanpa adanya penyimpangan di dalam nya seperti contoh dalam melaksanakan pengawasan pembangunan infrastruktur.
6. Sumber daya manusia adalah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur.
7. Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling utama yang harus ada dalam pengawasan pembangunan guna berjalan lancarnya suatu pengawasan yang sedang dikerjakan/dilakukan.
8. Efektivitas pengawasan pembangunan adalah suatu cara untuk mengetahui pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan efisien atau sebaliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2019 bertempat Di Desa Jenetallasa. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan oleh masih terdapatnya kelemahan dalam sistem pengawasan pembangunan yang dilakukan di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Sehubungan dengan hal yang diteliti adalah fenomena sosial, maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan maupun bahasa masing-masing informan sehingga dapat diungkap makna sebenarnya dari informasi yang diperoleh.
2. Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Pada penelitian ini data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti melalui dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis dan dikumpulkan yang digunakan dalam penelitian pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapya mengenai pelaksanaan Pengawasan. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah pegawai, baik pimpinan maupun bawahan yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Adapun yang menjadi informan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	NAMA	JUMLAH
1.	Ketua BPD Desa Jenetallasa	H.Abd. Rahman Dg. Kulle (AR)	1
2.	Kepala Urusan (KAUR) pembangunan Desa Jenetallasa	Bahtiar rauf (BR)	1
3.	TPK dan TPKD sebagai pelaksana pembangunan	Andika aldila (AA)	1
4.	masyarakat desa jenetallasa	Sulaiman saleh (SS). Zainuddin (ZD). Muhammad ishak (MI). Fajar Yande (FY)	4

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni :

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh BPD pada pembangunan infrastruktur desa terkhusus pada Desa Jenetallasa Kecamatan

Pallangga Kabupaten Gowa. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan proses tanya dan jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari BPD Desa Jenetallasa, kantor pemerintah Desa Jenetallasa, TPK dan TPKD sebagai pelaksana dan masyarakat desa Jenetallasa, yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan erat dengan pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gowa sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono,2012:92) memiliki tiga langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data(*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

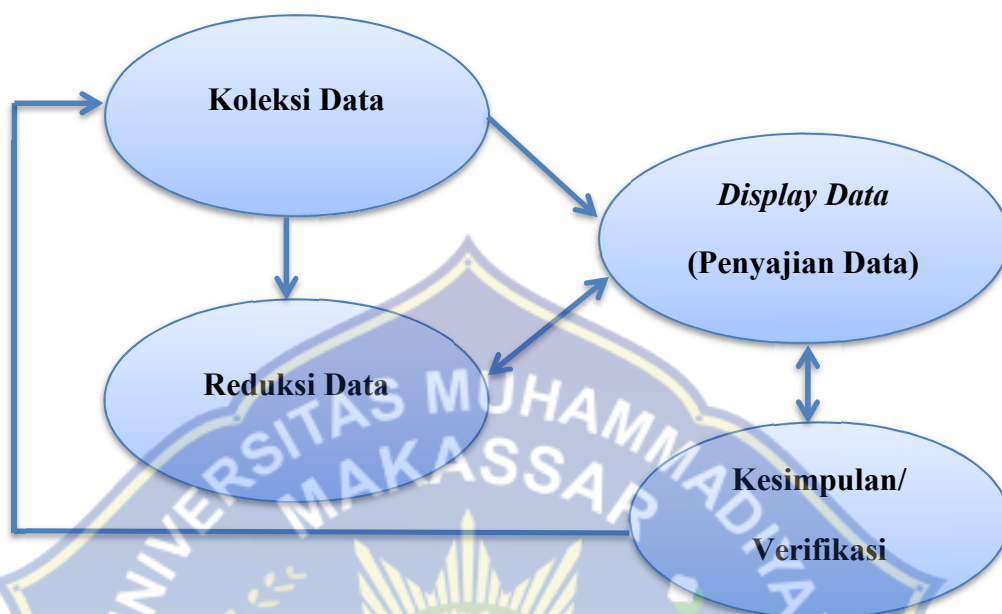
2. Penyajian Data(*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data-data yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif adalah yang memiliki sifat naratif. Hal ini dimaksudkan agar mampu memahami apa yang sedang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan Kesimpulan(*Conclusion Drawing*)

Langkah akhir dari model ini merupakan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian kemungkinan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal namun dapat pula tidak, karena permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan mampu berkembang setelah peneliti dilakukan di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang sebelumnya tidak ada yang berupa gambaran atau deskripsi yang sebelumnya belum ataupun tidak jelas menjadi jelas.

Bagan 3.2 analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman



G. Pengabsahan Data

uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability, dan uji confirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam pengecekan keabsahan data, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan oleh umum dengan apa yang dikatakan pribadi,

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada kantor BPD terkait tentang pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama tetapi dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di kantor BPD dan desa Jenetallasa kabupaten Gowa valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Jenetallasa merupakan salah satu bagian dari wilayah administratif kecamatan Pallangga, dimana kecamatan Pallangga terdiri dari 4 kelurahan dan 12 Desa termasuk Desa Jenetallasa yang terletak di jalan Benteng Somba Opu. Dan berdiri sejak tahun 1989. Desa Jenetallasa memiliki luas wilayah sebesar $3,22 \text{ km}^2$ yang terbagi kedalam 4 Dusun 19 RW dan 54 RT, Penduduk Desa Jenetallasa tercatat sebanyak kurang lebih 18.151 jiwa yang terdiri dari 9.038 laki-laki dan 9.113 perempuan.

Desa jenetallasa merupakan pemekaran dari desa kanjilo yang menjadi dua desa dan satu kelurahan yaitu desa kanjilo sebagai desa induk kelurahan lembang parang dan desa persiapan jenetalasa. Desa persiapan jenetallasa berdiri pada tahun 1989 daengan kepala desa pertamanya adalah H. Sultani H Daeng Ngiri , dan menjadi desa depinitif pada tahun 1995, kemudian pada tahun 2000 diadakan pemilihan kepala desa jenetallasa yang diikuti oleh 2 orang pasangan calon yaitu H. Sultani DG ngiri dan Ibrahim Dg sija yang di menangkan oleh H. Sultani H dg Ngiri. kemudian Pada tahun 2005 diadakan kembali pemilihan kepala desa yang di ikuti oleh satu orang pasangan calon melawan kotak kosong dan di menangkan kembali oleh H. Sultan H Dg Ngiri dan menjadi kepala desa sampai Agustus 2008.

Kemudian pada tahun bulan oktober 2008 diadakan pemilihan kepala desa jentallasa yang diikuti oleh lima pasangan calon, yaitu , Muh. Halim, Nurdin Dg Tutu, Yulianti Dg Intan, Faisal Dg Bali', Syarifuddin Dg Rewa. Yang di menangkan oleh Faisal dg Bali' dan menjadi kepala desa jenetallasa sampai oktober 2014 kemudian November 2014 dijabat oleh pelaksana harian oleh Nur alam Sultan sampai desember 2016.

Kemudian 29 Desember 2016 diadakan pemilihan kepala desa jenetallasa yang diikuti oleh 5 orang pasangan calon yaitu, Asrul.,St, Yulianti Dg Intan, Ade Wahyuni Karim,S.Pd, Abdul Aziz Dg siajang, Saharuddin Dg Mone dan di menangkan oleh Asrul.,St yang di lantik menjadi kepala desa jenetallasa pada tanggal 1 february 2017 , dan menjabat sebagai kepala desa sampai sekarang.

2. Visi dan Misi

- a. Visi merupakan ide-ide dan rencana pemimpin untuk masa depan organisasi dan menjabarkannya melalui visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Jenetallasa Yang Mandiri Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa“

- b. Misi merupakan penjabaran dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk produk dan pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta cita-cita di masa mendatang. Sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka BPD Desa Jenetallasa mempunyai misi sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
2. Peningkatan kehidupan sosial budaya masyarakat;
3. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
6. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Tugas dan Fungsi BPD

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Jenetallasa berdasarkan keputusan Bupati Gowa tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa periode tahun 2015-2021

Gambar 4.1 struktur organisasi BPD



B. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Pengawasan dalam pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat penting, dimana pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan atau kesalahan dalam melakukan pembangunan, maka dari itu BPD selaku parlemen di Desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 61 tentang Desa, adalah selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD juga bertugas untuk mengawasi pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan di Desa.

Maka dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD ini diharapkan bahwa pembangunan yang sedang berjalan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan dapat selesai tepat pada waktunya sesuai dengan hasil musrembang yang telah disepakati bersama. Maka untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan adanya kerja sama antar masyarakat setempat dengan BPD dan aparatur desa lainnya dengan bersama-sama memantau segala jenis kegiatan ataupun pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan hasil pemikiran Makmur (2013:193) Untuk menentukan efektifitas dalam pengawasan sehingga diperlukan teknik-teknik pengawasan yang maksimal dalam melakukan pengawasan dilapangan. Adapun teknik-teknik pengawasan yang dimaksudkaan meliputi : (1) teknik pemantauan, (2) teknik pemeriksaan, dan (3)teknik penilaian. Faktor penghambat/kendala dalam pengawasan: kurangnya sumber daya manusia. Faktor pendukung dalam pengawasan: anggaran yang mendukung.

1. Teknik Pemantauan

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada pemerintah yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang terlihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang telah kita rencanakan di implementasikan dengan baik.

Menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat yang menjabat sebagai sekretaris BPD, meyakinkan bahwa. “dari segi pemantauan dalam hal ini BPD sebagai perwakilan dari masyarakat akan turun langsung meninjau, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur, jalan, dan pemberdayaan pada masyarakat dengan terjun langsung meninjau, memonitoring, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan penting yang menjadi lokus di desa . hal ini dilaksanakan agar pembangunan infrastruktur dan kegiatan- kegiatan penting lainnya di desa dapat terlaksana dengan baik”.

- a. wawancara ini merujuk kepada indikator dari teknik pemantauan dalam pengawasan, yakni sebuah teknik dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi pembangunan yang dan seluruh kegiatan desa dengan cara memantau kinerja pembangunan infrastruktur dari Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Bentuk pemantauan kinerja dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa Jenetalassa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa ini ditunjukkan dengan wawancara yang dilakukan, pada hal ini berdasarkan pernyataan dari informan yang berinisial AR (Ketua BPD desa Jenetallasa) yang mengatakan:

“...sedangkan untuk pemantauan kinerja dari pembangunan desa itu sudah ada pada laporan pertanggung jawaban desa, kita akan melihat semua hasil apa yang dikerjakan dilapangan kemudian di cocokkan dengan hasil dari laporan pertanggung jawaban yang ada.” (hasil wawancara 18 April 2019)

Selanjutnya yang dikatakan BR (Kepala Urusan Pembangunan Desa) senada dengan yang dikatakan oleh AR, yakni mengatakan :

“...bentuk pengawasan yang dilakukan itu yakni misalnya, melakukan pengawasan proyek pembangunan infrastruktur desa langsung serta dapat di lihat berdasarkan laporan pertanggung jawaban yang sudah ada....” (Hasil wawancara 18 April 2019)

Kemudian dari kedua wawancara tersebut di diperkuat dengan pernyataan dari informan AA (TPKD Pelaksana Pembangunan Desa) yang menyatakan bahwasannya :

“...sebagai pelaksana pengawasan tentu yang kami lakukan harus ketat, contohnya pada pengawasan langsung proyek pembangunan untuk memastikan tidak ada kekeliruan sedikitpun pada proses pelaksanaan dan mendapatkan hasil yang baik.” (hasil wawancara 26 April 2019)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemantauan kinerja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa ini adalah berdasarkan laporan kerja dan laporan pertanggung jawaban dari pihak pelaksana pembangunan tersebut. Sedangkan masyarakat yang di wawancarai dalam hal ini berdasarkan informan SS mengatakan bahwa :

“...saya tidak mengetahui hal tersebut, akan tapi yang saya tahu memang sudah ada yang bertugas sebagai pengawas pembangunan..”

Senada dengan yang dikatakan oleh SS, ZD (masyarakat) juga demikian mengatakan bahwa:

“...saya tidak paham akan hal tersebut, baik itu urusan atau cara mereka mengawas seperti apa, di karenakan kami hanya masyarakat awam saja...” (hasil wawancara 29 April 2019)

Namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh MI (masyarakat) yang mengatakan bahwasannya pemantauan kinerja yakni:

“...dari sudut pandang saya liat pengawasannya dari pemerintah biasa saja tidak ada yang perlu di khawatirkan, saya melihatt aparat desa sudah

beberapa kali menyambangi langsung proyek pembangunan infrastruktur desa...” (hasil wawancara 29 April 2019)

Jadi dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa beberapa masyarakat tidak tau, bahkan tidak peduli dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, akan tetapi tidak semua masyarakat acuh akan hal tersebut, berdasarkan wawancara diatas juga menemukan bahwasannya pemantauan dari masyarakat pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan dari laporan kerja dan laporan pertanggung jawaban namun juga ada pemantauan yang dilakukan langsung pada pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. . Namun berdasarkan fakta lapangan yang ada bahwasannya pemantauan yang dilakukan oleh BPD hanya bersifat formal saja yakni hanya sekedar berkunjung namun tidak di lakukan pengawasan dengan keseluruhan secara baik dan sesuai Standar operasional yang ada.

- b. Pengawasan yang dilakukan dengan benar atau tidak di Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Hal ini ditunjukkan berdasarkan wawancara yang dilakukan pada informan AR (Ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“...Pengawasan yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang sudah ada dan insya allah pemantauan atau pengawasan yang di lakukan oleh BPD Jennetallasa sudah sesuai degan prosedur...” (wawancara 18 April 2019)

Selanjutnya yang dikatakan oleh AR (ketua BPD) senada dengan yang dikatakan oleh BR (Kepala Urusan Pembangunan Desa) dan AA (TPKD pelaksana pembangunan desa) yang mengatakan bahwasannya :

“...pasti kami melaksanakan pengawasan dengan benar, sudah sesuai dengan standar oprasional yang ada, karena jika kami tidak melaksanakan

pengawasan dengan benar akan berdampak pada hasil pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan yang diharapkan..” (hasil wawancara 18 April 2019)

Dari hasil wawancara diatas Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa Jenetallasa dengan jelas mengatakan bahwasannya pengawasaan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut sudah benar dan sesuai dengan yang seharusnya dilakukakn oleh sebuah lembaga pengawasan, Namun dari beberapa masyarakat yang diwawancarai, masyarakat senada dengan mengatakan, SS,ZD,MI dan FY mengatakan Bahwa:

“...untuk pengawasan sudah benar atau tidak saya kurang paham karena pada dasarnya semua itu diketahui oleh pemerintah kami masyarakat tidak tahu menahu akan hal tersebut dan juga kurangnya pemerintah dalam melibatkan kami pada proses tersebut...” (dari hasil wawancara 29 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat yakni tidak mengetahui apakah sudah benar atau tidak cara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan masyarakat tidak mengetahui bagaimana standar yang benar dalam menilai sebuah pengawasan dan juga pada pengawasan ini masyarakat kurang dilibatkan. Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa Jenetallasa menekankan bahwasannya pengawasan yang dilakukan sudah benar dan sudah berdasarkan standar penilaian, namun masyarakat sendiri tidak mengetahui standar kebenaran dikarenakan kurangnya pengetahuan pengawasan masyarakat dan juga kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tersebut. Sedangkan berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwasannya memang masyarakat

tidak paham seperti apa standar penilaian pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan benar adanya masyarakat kurang dalam melibatkan masyarakat secara langsung.

- c. Kordinasi pengawasan dengan sesama lembaga pemerintah Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, hal ini ditunjukkan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh informan AR (ketua BPD)

yang mengatakan bahwa :

“..kami melakukan kordinasi sesama lembaga pemerintah desa, mulai dari seperti apa, sudah pada tahap apa dan apa saja tindakan pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses pembangunan infrastruktur desa....” (hasil wawancara 18 April 2019)

Selanjutnya yang dikatakan oleh AR (ketua BPD) hampir senada dengan yang dikatakan oleh BR (Kepala Urusan Pembangunan Desa) yang mengatakan bahwa:

“... kordinasi BPD dengan pemerintah desa tentu ada yakni komunikasi antar kedua belah pihak terhadap pengawasan seperti melakukan kerja sama pengawasan pada proses pembangunan dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa...” (hasil wawancara yang dilakukan 18 April 2019)

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas menyatakan bahwasannya ada kordinasi antar lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan juga pemerintah desa di karenakan BPD sebagai lembaga yang terlibat langsung sebagai pengawas dari pelaksanaan pembangunan progam desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Kemudian semakin di dukung oleh informan AA (TPKD Pelaksana Pembangunan Desa) yang mengatakan:

“...kordinasi pengawasan antar sesama lembaga pemerintah desa tentu ada karena memang sudah tugas dan fungsi BPD melakukan pengawasan pada setiap kegiatan dan pembangunan yang dilakukan desa, jadi kordinasi sesama lembaga pemerintah baik itu BPD dan pemerintah desa alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala...” (hasil wawancara 26 April 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan yakni pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan dan Badan Permasyarakatan desa (BPD) sebagai pengawas tentu melakukan kordinasi satu sama lain terkait lancarnya pembangunan-pembangunan yang dilakukan untuk desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), berdasarkan informan AR (ketua BPD) mengatakan yakni:

“... pengawasan langsung yang dilakukan oleh BPD itu dengan melakukan pengawasan secara langsung pada pembangunan infrastruktur desa, dan untuk pengawasan secara tidak langsung yakni dengan berdasarkan hasil dari laporan kerja yang dibuat oleh pelaksana pemmbangunan...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Kemudian berdasarkan yang di kemukakan oleh AR (ketua BPD) juga diperkuat dari informan yang berinisial BR (Kepala urusan pembangunan desa) yang mengatakan hal yang hampir serupa adalah:

“..untuk pengawasan langsung yakni seperti mengawasi para pekerja proyek secara langsung, kalau secara tidak langsung dapat dilihat melalui dari hasil laporan keuangan dana desa mengenai pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh BPD yakni adalah dengan cara berkunjung ke lapangan dan juga mengawasi secara detail pengeluaran dan pemasukan anggaran/dana sedangkan pengawasan secara tidak langsung berdasarkan laporan-laporan seperti laporan keuangan, laporan pertanggung jawaban. Dan juga berdasarkan penuturan AR dan BR memiliki makna yang sama yakni dari informan AA (TPKD Pelaksana pembangunan Desa) yang mengatakan bahwa:

“...untuk pengawasan secara langsung sebagai pelaksana yakni kami melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, sedangkan untuk pengawasan secara tidak langsung yakni dari hasil laporan pekerja proyek pembangunan infrastruktur dan masyarakat mengenai seperti apa dan bagaimana yang telah dilakukan pelaksana proyek pembangunan...”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwas sebenarnya pemerintah dalam melakukan pengawasan secara langsung yakni berinteraksi langsung dengan pekerja dan berkunjung langsung kelapangan, sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini adalah dengan melihat laporan-laporan kerja dan laporan dari pekerja dan masyarakat sekitar. Namun pada fakta yang terjadi dilapangan kordinasi pengawasan sangat jarang dilakukan dan lebih cenderung hanya pemerintah desa langsung yang terlibat dalam pengawasan

Jadi berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya teknik pemantauan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari bentuk pemantuan yang dilakukan secara

langsung, adapun bentuk pemantauan secara langsung itu yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan. Sedangkan untuk pemantauan secara tidak langsung dapat di pantau berdasarkan laporan kerja dari pembangunan tersebut dan juga laporan masyarakat dan para pekerja, sehingga kordinasi antar lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas pembangunan dan Pemerintah Desa sebagai pelaksana pembangunan itu sangat dibutuhkan.

Dari hasil wawancara pada teknik pemantauan didapatkan bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemantauan dengan dua cara dengan melakukan pemantauan langsung yakni melakukan pengawasan langsung pada lokasi pembangunan infrastruktur desa, dan kemudian melakukan pemantauan secara tidak langsung yang dilakukan dengan cara laporan dari para pekerja dan juga dari hasil laporan pertanggung jawaban pelaksana pembangunan infrastuktur desa tersebut, berdasarkan teori pengawasan oleh makmur pada indikartor pemantauan yakni salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada pemerintah yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang terlihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang telah kita rencanakan diimplementasikan dengan baik.

Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan suatu kebenaran, tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan bahwasannya pada Badan Permusyawaratan Desa pada teknik pemeriksaan, yakni setelah Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur memang dilakukan lagi pemeriksaan kembali secara tidak langsung dari hasil laporan pertanggung jawaban tersebut oleh pemerintah daerah, dan biasanya dilakukan oleh inspektorat daerah yang melakukan audit dan menyesuaikan hasil dengan laporan yang diberikan hal ini berdasarkan teori pengawasan.

pada indikator teknik pemeriksaan oleh makmur yakni bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak lain atas pengawasan yang dilakukan itu. Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan subjektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran.

2. Teknik Pemeriksaan

Telah memaklumi bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan.

teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak lain atas pengawasan yang dilakukan itu. Memang masalah pemeriksaaan ini kadang dilakukan subjektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran.

- a. Dari hasil olah data merujuk kepada indikator teknik pemeriksaan dalam pengawasan yang mana merupakan sebuah proses dari pengawasan dan kemudian kembali dilakukan pemeriksaaan terhadap pengawasan tersebut khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa yang berada di desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

Pengawasan pembangunan ditunjukkan dengan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan AR (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“...semua pengawasan yang kami lakukan akan kembali diperiksa, mengenai apakah pengawasan yang dilakukan sudah benar sesuai dengan prosedur atau masih ada yang harus diperbaiki lagi...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Selanjutnya dari hasil wawancara diatas hampir senada dengan yang dikatakan oleh BR (Kepala Urusan Pembangunan Desa) yang juga demikian mengatakan:

“...iya, biasanya kalau sudah melakukan pengawasan akan ada pemeriksaan lagi oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah inspektorat pemerintah daerah mengenai semua pertanggung jawaban pembangunan maupun kegiatan desa...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Dan kemudian dilanjutkan dari informan AA (TPKD pelaksana pembangunan desa) mengatakan:

“...setahu saya, memang ada yang sudah bertugas dari pemerintah kabupaten terkait pemeriksaan kembali pembangunan maupun kegiatan desa dan mempertanggung jawabkan laporan kinerja desa. Jadi BPD mengawasi pembangunan di desa kemudian di periksa kembali oleh inspektorat kabupaten....” (hasil wawancara 26 April 2019)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya memang terjadi pemeriksaan pengawasan setelah dilakukan pengawasan pembangunan yang mana dalam hal pemeriksaan ini yang diperiksa yakni Badan Permasyarakatan Desa yang bertugas sebagai pengawas dan juga pemerintah desa yang bertugas sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur desa. berdasarkan penuturan dari informan SS(masyarakat) dan sebagaian besar masyarakat mengatakan:

“...saya tidak mengetahui hal tersebut..” (berdasarkan hasil wawancara 2019)

Namun dari sekian banyak informan masyarakat yang menyatakan tidak tau ada informan yang berinisial MI (masyarakat) yang mengatakan bahwa:

“...setahu saya memang ada pemeriksaan kembali oleh pihak kabupaten pada setiap akhir tahun.” (berdasarkan hasil wawancara 29 April 2019)

Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan maka pemeriksaan kembali yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa memang benar adanya yang mana tugas pemeriksaan kembali hasil pengawasan kegiatan pembangunan tersebut dilakukan oleh pihak daerah yang mana bertugas dalam hal ini adalah direktorat.

Pemeriksaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yang berinisial AR (Ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..hambatan yang biasa menjadi masalah dalam keberhasilan suatu pembangunan pada desa yakni adalah kurangnya fasilitas. jika fasilitas mumpuni maka tidak ada yang tidak mencukupi dan tentu akan mempercepat jalannya sebuah pembangunan...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Selanjutnya yang dikatakan oleh AR (ketua BPD) senada dengan yang dikatakan oleh BR (Kepala urusan pembangunan desa) dan AA (TPKD pelaksanaan pembangunan desa) mengatakan bahwa:

“..hambatan yang biasa menjadi masalah dalam keberhasilan suatu pembangunan pada desa yakni adalah dana, jika fasilitas tersebut tidak mencukupi tentu akan menghambat jalannya sebuah pembangunan...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Yang mana dalam hal ini kedua informan tersebut menyebutkan anggaran sebagai hambatan pemeriksaan dikarenakan pembangunan yang dilakukan sering terjadi dihentikan dikarenakan anggaran dan yang tidak mencukupi dan juga kurangnya partisipasi dari masyarakat sendiri. Jadi dari hasil wawancara diatas yakni hambatan dalam pemeriksaan suatu pengawasan dikarenakan kekurangan anggaran yang menyebabkan tersendatnya pembangunan desa yang kemudian

akan mempersulit proses pemeriksaan kembali. namun berdasarkan fakta yang terjadi sangat disayangkan dikarenakan memang pada saat kekurangan fasilitas dalam bekerja akan membuat pekerjaan menjadi penghambat.

- b. Berdasarkan wawancara pemeriksaan kembali yang dilakukan pada pengawasan yang berdasarkan Standar operasional sebuah pemeriksaan, berdasarkan informan dengan inisial AR (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“...pemeriksaan yang dilakukan tentu sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku untuk pengawasan...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Selanjutnya dari penuturan, informan BR (Kepala urusan pembangunan desa) juga hampir senada dengan yang dikatakan oleh AR (ketua BPD) yakni:

“... untuk hal tersebut tidak ada dikarenakan pemeriksaan kembali dilakukan oleh orang yang profesional dalam bekerja dan pemeriksaan tersebut langsung oleh pemerintah daerah yang kami tidak mengetahui dan mengenal secara...” (hasil wawancara 18 April 2019).

Dengan hasil wawancara diatas, bahwasannya pemeriksaan kembali pada pengawasan sudah dilakukan berdasarkan standar operasional yang telah ditentukan, khususnya dalam hal ini pemeriksaan kembali diadakan oleh pemerintah daerah yang ditugaskan dalam hal pemeriksaan yakni adalah inspektorat daerah. Namun sedikit berbeda dengan yang dikatakan oleh AA

(TPKD pelaksana pembangunan desa) yang mengatakan :

“kalau itu saya kurang tahu, tapi saya yakin bahwa semua orang yang melakukan pemeriksaan adalah orang yang profesional dalam bekerja dan sudah dipilih berdasarkan standar yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.” (hasil wawancara 26 April 2019)

Pada keterangan diatas informan tidak tau seperti apa standar dari sebuah pemeriksaan namun informan percaya bahwa pemeriksa melakukan pekerjaannya secara baik dan jujur berdasarkan asas keadilan dan tentunya bersikap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian salah satu informan ZD (masyarakat) yang sebagaian besar menjawab hal yang sama dengan informan tersebut yakni:

“..saya tidak mengetahui hal tersebut, hanya mereka yang paham hal tersebut dan seperti apa pemeriksaan yang dilakukan..” (hasil wawancara 29 April 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas yang menunjukkan bahwasannya menurut pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berdasarkan aturan, namun karena kurangnya keterlibatan langsung dari masyarakat membuat kurangnya kepercayaan masyarakat dalam hal tersebut.

3. Teknik Penilaian

Yakni bagaimana menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan, apakah itu dilakukan berdasarkan dengan kebenaran atau dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan.

Teknik penilaian sebagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan dengan cara yang tepat , adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik undur pelaksanaan kegiatan, maupun oknum pengawasan yang paling penting adalah kelembagaan atau organisasi yang

bersangkutan, baik dalam bidang pemerintahan atau publik maupun di bidang swasta atau privat, karena penilaian ini dapat dilakukan secara objektif, maupun secara subjektif yang relatif menentukan adalah ketepatan teknik yang digunakan.

- a. Teknik penilaian pada pengawasan hal yang bertentangan dengan nilai dalam pengawasan menurut informan AR (ketua BPD) mengatakan:

“..hal yang bertentangan antara nilai pengawasan dengan pengawasan kalau menurut saya tidak ada, karena kami melakukan pengawasan berdasarkan prosedur yang ada...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Selanjutnya dari penuturan dari informan AR (ketua BPD) senada juga dengan yang dikatakan oleh BR (kepala urusan pembangunan desa) dan AA (TPKD pelaksana pembangunan desa) yakni:

“...kalau untuk itu menurut saya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai pengawasan yang dilakukan selama ini...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yakni adalah tidak ada nilai yang bertentangan pada nilai-nilai pengawasan pada Badan permusyawaratan desa (BPD).

Partisipasi masyarakat dalam menilai pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berdasarkan wawancara yang berdasarkan wawancara informan AR (Ketua BPD) mengatakan yakni:

“...saya kurang tahu seperti apa penilaian masyarakat kepada kami karena perbedaan pendapat dari setiap masyarakat namun dalam hal pro kontra tidak dapat kami hindari...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Namun sedikit berbeda dengan yang dikatakan oleh informan AR (ketua BPD), informan yang berinisial BR (Kepala urusan pembangunan desa) mengatakan bahwa :

“...dari beberapa masyarakat yang saya temui yakni penilaian masyarakat pada pengawasan yang di lakukan oleh BPD maupun perangkat desa tidak ada masalah ...” (hasil wawancara 18 April 2019)

- b. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya masyarakat selama ini tidak pernah memberikan penilaian kepada pemerintah terkait pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sehingga menganggap masyarakat tidak ada masalah dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan informan AA (TPKD pelakasana pembangunan desa) mengatakan bahwasannya:

“...penilaiannya masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan BPD juga tidak ada masalah dikarenakan masyarakat tidak peduli terhadap jurusan pemerintahan...” (hasil wawancara 26 April 2019)

Yang menyatakan bahwasannya masyarakat sebenarnya tidak ada masalah atau tanggapan pada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Desa di karenakan masyarakat tidak antusias dengan kegiatan pemerintahan desa sehingga tidak memperdulikan seperti apa penilaian pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa.

Akan tetapi respon dari masyarakat dalam hal ini adalah sebagai berikut berdasarkan informan ZD yang mengatakan :

“...sebagai masyarakat saya saja tidak tahu mau menilai hal ini seperti apa, sudah baikkah, atau belum dikarenakan memang masyarakat tidak dilibatkan pada proses tersebut....” (hasil wawancara 29 April 2019)

Selanjutnya dari yang dikatakan oleh ZD , hampir senada dengan yang dikatakan oleh MI yakni :

“...BPD jarang di sorot oleh masyarakat, BPD menurut saya seolah-olah hanya sekedar formalitas saja dikarenakan jarang terlihat dan terlibat pada kegiatan...”

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat tidak mengetahui seperti apa dan bagai mana menilai sebuah pengawasan, dan juga BPD dalam menjalankan tugas tidak sepenuhnya melakukan dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa nampak tidak begitu aktif. Jadi dalam keseluruhan teknik penilaian dalam pengawasan ini berdasarkan hasil wawancara keseluruhan bahwasannya tekni penilaian yang dilakukan Badan Permusyawaratan desa tidak mengalami pertentangan dengan apa yang dilakukan oleh BPD, namun pada paerisipasi masyarakat dalam menilai Badan Permusyawaratan Desa.

Dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwasannya penilaian dari masyarakat akan kinerja pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam hal ini tidak terlalu aktif melainkan hanya sesekali melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur desa, kemudian dalam hal pertentangan dalam nilai-nilai pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa itu tidak ada hal diluar atau menyimpang dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan teori pengawasan pada indikator teknik penilaian dari Makmur yakni menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan, apakah itu dilakukan berdasarkan dengan kebenaran atau dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian sebagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan dengan cara yang tepat, adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik undur pelaksanaan kegiatan, maupun oknum pengawasan yang paling penting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan, baik dalam bidang pemerintahan atau publik maupun di bidang swasta atau privat, karena penilaian ini dapat dilakukan secara objektif, maupun secara subjektif yang relatif menentukan adalah ketepatan teknik yang digunakan. Namun pada partisipasi masyarakat dalam menilai Badan Permusyawaratan Desa. berdasarkan keadaan lapangan bahwasannya penilaian dilakukan tidak benar-benar pada indikator yang telah disebutkan

4. Faktor Penghambat pembangunan infrastruktur pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Badan permusyawaratan desa merupakan pengawas dari pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, pada pengawasan tersebut tentu ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi sebuah pengawasan baik itu faktor yang menghambat berjalannya pengawasan dengan lancar maupun faktor yang kemudian mendorong pengawasan menjadi semakin baik.

- a. faktor penghambat yang menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa yakni berdasarkan informan AR (ketua BPD) yang mengatakan bahwa :

“...untuk faktor penghambat pada pengawasan yakni, sumber daya manusia ada belum cukup dikarenakan keterampilan yang minim serta sarana dan prasarana yang minim sehingga desa serba mengalami keterbatasan...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Selanjutnya yang dikatakan oleh AR (ketua BPD) hampir senada dengan yang dikatakan oleh BR (Kepala urusan pembangunan desa) yang mengatakan:

“...dari yang saya lihat adalah sarana dan prasarana mungkin yang kurang, fasilitas pengawas yang terbatas kemudian pengawas jadi terkendala atau malas menjalankan tugasnya...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya faktor penyebab dari kurangnya kinerja pengawasan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia serta keterampilan dan pendidikan yang rendah yang ada di desa Jenetallasa, namun berbeda dengan informan AA yang mengatakan bahwa faktor penghambat adalah:

“penghambat pengawasan yang saya lihat adalah kurangnya kesadaran pada tugas yang diberikan” (hasil wawancara 26 April 2019)

Jadi berdasarkan wawancara diatas masih banyak faktor penghambat dari pengawasan yang selama ini Badan Permusyawaratan Desa yakni sumber daya manusia dalam hal ini skill dan juga pendidikan masyarakat desa yang masih rendah, kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa yang masih terbatas, serta kesadaran dari aparat Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurang terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas jalannya pembangunan infrastruktur desa. dan berdasarkan memang keadaan lapangan yakni bahwa pendorong masyarakat hanya berdasarkan hasil yang kemudian di dapatkan

5. Faktor Pendukung pembangunan infrastruktur pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

- a. Berdasarkan olah data faktor pendukung terjadinya pengawasan antara lain yakni berdasarkan wawancara dengan informan AR (ketua BPD) yang mengatakan :

“...untuk faktor pendukung dalam sebuah pengawasan menurut saya secara pribadi ada tanggung jawab, yang mengharuskan kami mengerjakan tugas tersebut dikarenakan, kemudian juga adalah desakan dari masyarakat atas pembangunan infrastruktur agar lebih cepat diselesaikan...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Namun yang dikatakan oleh AR (ketua BPD) berbeda dengan yang dikatakan oleh BR (Kepala urusan pembangunan desa) dan AA (TPKD pelaksanaan pembangunan desa) yang mengatakan :

“...kalau untuk itu saya juga kurang tahu, tapi pendukungnya bisa karena memang kebutuhan dan tugas saja dan insentif yang diberikan dari hasil pengawasan tersebut...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas faktor pendukung terjadinya sebuah pengawasan yaitu adanya kesadaran yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa dan tentunya adanya insentif serta kebutuhan dari tugas yang diberikan.

- b. Berdasarkan diatas keterlibatan masyarakat dalam mengawas berdasarkan penuturan dari informan AR (Ketua BPD) yakni adalah:

“...menurut saya, masyarakat terlibat secara tidak langsung, karena jika ada hal yang tidak sesuai pada pembangunan tentu masyarakat akan melakukan kritik pada pemerintah desa maupun BPD sebagai...” (hasil wawancara 18 April 2019)

Selanjutnya berdasarkan informan AR (ketua BPD) senada dengan yang dikatakan oleh BR(Kepala urusan pembangunan desa) yang mengatakan bahwa :

“...memberikan dampak, karena kalau tidak ada pengawasan kemudian terjadi kesalahpahaman masyarakat akan kritis pada hal tersebut...”

Serta dari wawancara informan AA yang mengatakan bahwa :

“...sebenarnya masih ada beberapa masyarakat yang peduli dengan pembangunan infrastruktur jadi masyarakat ini setidaknya memberikan pengaruh dari kinerja pengawasan dan juga pembangunan infrastruktur desa...” (hasil wawancara 26 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas adalah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tentunya juga akan memberikan pengaruh dan dampak pada sebuah pengawasan, dikarenakan jika pembangunan tidak sesuai maka masyarakat akan meberikan respon kepada pemerintah desa, jadi berdasar kan keseluruhan faktor penghambat yang masih kurang baik itu dari sumberdaya manusia skill dan pendidikan yang masih rendah serta kurangnya kesadaran masyarkat, namun pendorong dari pengawasan itu sendiri juga bisa masyarakat dan diri sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, dan juga keterlibatan masyarakat tentu akan mempengaruhi jalannya sebuah pengawasan yang baik. berdasarkan fakta lapangan memang sebenarnya kurangnya fasilitas sarana dan sarana membuat program-program tidak mampu terus berjalan dan akhirnya kandas ditengah jalan

Dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwasannya faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah yakni kesadaran dari tugas dan

tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdul Rahman dalam faktor yang mempengaruhi sebuah pengawasan yakni Menurut Abdurrahman (Syafii, 2011:110) ada beberapa faktor yang dapat membantu pengawasan dan mencegah dari berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, antara lain: Filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, agama yang mendasar pada seseorang, Kebijakan yang dilakukan, Anggaran pembiayaan mendukung, Penempatan pegawai serta prosedur kerja, Kemantapan koordinasi terhadap organisasi. Berdasarkan yang dikemukakan di atas, bahwa dalam pengawasan memerlukan pemikiran-pemikiran yang sudah menjadi hal terbiasa dilingkungan tersebut. Menanamkan rasa keyakinan seseorang dalam beragama agar seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dan menjalankan perintahnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas persoalan atau pekerjaan tersebut. Karena setiap perbuatan yang dilakukan akan disegani dengan dipercayai dan meyakini bahwasannya setiap pekerjaan selalu diamati dan diperhatikan.

Sedangkan Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas ditemukan bahwasannya faktor yang menghambat pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yakni adalah kurangnya sumber daya manusia khususnya pada keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan permusyawaratan Desa dalam melaksanakan

tugas pengawasan berdasarkan yang dikemukakan oleh mardismo kendala-kendala dalam pengawasan yakni

1) Sumber Daya Manusia Dengan terbatasnya jumlah pegawai terutama pejabat fungsional sehingga yang melakukan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh seluruh staf. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tidak lagi melihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal.

2) Sarana Dan Prasarana

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu kendala dalam pengawasan. Padahal wilayah kabupaten sangat luas dan masih banyak daerah yang masih jauh dari pusat Kabupaten.

BAB V

PENUTUP.

A. Kesimpulan

1. Jadi berdasarkan hasil penelitian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawasan desa ada 3
 - a. teknik pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yakni sebagai berikut Teknik pemantauan berdasarkan keseluruhan hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya teknik pemantauan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari bentuk pemantuan yang dilakukan secara langsung, adapun bentuk pemantauan secara langsung itu yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan. Sedangkan untuk pemantauan secara tidak langsung dapat di pantau berdasarkan laporan kerja dari pembangunan tersebut.
 - b. Teknik pemeriksaan berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwasannya menurut pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berdasarkan aturan, namun karena kurangnya keterlibatan langsung dari masyarakat membuat kurangnya kepercayaan masyarakat dalam hal tersebut.
 - c. Teknik penilaian Berdasarkan wawancara masyarakat tidak mengetahui seperti apa dan bagai mana menilai sebuah

pengawasan, dan juga BPD dalam menjalankan tugas tidak sepenuhnya melakukan dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa nampak tidak begitu aktif. Jadi dalam keseluruhan teknik penilaian dalam pengawasan ini berdasarkan hasil wawancara keseluruhan bahwasannya teknik penilaian yang dilakukan Badan permusyawaratan desa tidak mengalami pertentangan dengan apa yang dilakukan oleh BPD, namun pada paerisipasi masyarakat dalam menilai Badan Permusyawaratan Desa.

2. Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas adalah faktor yang
 - a. mempengaruhi/ mendorong pengawasan yakni adanya kesadaran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan desa akan tugasnya sebagai pengawas kegiatan desa baik itu dalam pembangunan infrastruktur desa.
 - b. faktor penghambat dari pengawasan yakni kurangnya sumber daya manusia, baik itu secara kemampuan wawasan dan juga kurangnya prasarana dan sarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa bersinergi dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dari pengawasan.
2. Diharapkan Badan Permusyawaratan desa melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa.

3. Diharapkan masyarakat desa lebih berpartisipasi dan peduli dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *pembangunan perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiffuddin. 2010. *pengantar administrasi pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Effendi, Bachtiar. 2002. *pembangunan daerah otonomi berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiendo dan offest
- Fahmi, 2012. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Gramedia
- Gassing Asnawir, Skripsi, 2015, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Makassar Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis Di Kota Makassar*, Makassar
- Huda, Ni'matul, 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH VII Press
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Makmur, H, 2013, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika
- Mankiw, N. Gregory (2003). *Teori Makro ekonomi Edisi Kelima. Terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardismo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta : Andi
- Siagian P. Sondang, 2016, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi aksara
- Siagian P. Sondang. 2005. *administrasi pembangunan, konsep dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soelistriyo, 2016. *Pengawasan Pusat Tehadap Daerah*, Yogyakarta: FH VII Press
- Sondang P. Siagian. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Askara
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suriansyah, Murhaimi, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan isu pembangunan*. Jakarta: UM-Press
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi, Edisi kesembilan*. Haris Munandar [penerjemah]. Jakarta: Erlangga.
- Viktor, M . Situmorang, Dan Jusuf Jahir , 1994, *Aspek Hukum Pengawasann Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta

Wibowo, 2014. *Manajemen Kinerja, Edisi keempat*, Jakarta:Rajawali Pers

DOKUMEN

Perdes Desa Jenetallasa nomor 04 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP-Desa) Tahun 2018.

Perpres nomor 75 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas

Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa

Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD

INTERNET

<https://www.pontianakpost.co.id/puluhan-tahun-tak-tersentuh-pembangunan>
diakses pada 10 Oktober 2018

<https://www.sepengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-badan-permusyawaratan-desa-bpd-tujuan-tugas-wewenang.html> diakses pada 19 November 2018



L

A

M

P

I

R

A

N



wawancara dengan TPK/TPKD



wawancara dengan Ketua BPD Desa Jenetallasa



KAUR PEMBANGUNAN DESA JENETALLASA



Pekerjaan Drainase Dusun Jenetallasa



Pembangunan Paving Blok Dusun Cambayya



OLAH DATA

1. Teknik Pemantauan

NO	INFORMAN	INDIKATOR
1.	H. Abd. Rahman Dg. Kulle (Ketua BPD)	<ul style="list-style-type: none">• “ee kalau untuk pemantauan kinerja dari pembangunan desa itu sudah kan sudah ada di laporan-laporan pertanggung jawaban desa kita liat semua disitu apakah sudah sesuai dengan laporan dengan di bandingkan dengan hasil yang sudah dikerjakan, bgitu saya kira”• “pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada dan insya allah pemantauan atau pengawasan yang di lakuka BPD Jennetallasa sudah sesuai degan yang seharusnya”• “untuk kordinasi pengawasan ya tentulah kita berkordinasi dengan pemerintah desa, sampai mana yang sudah dikerjakan dan sejauh mana tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa”• “ee pengawasan langsung yang dilakukan oleh BPD itu misalnya kalau ada pmbangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa kami BPD biasa berkunjung ke kantor desa bicara-bicara sama pak desa tentang pembangunannya dan juga kita tentunya datang langsung ketempat pembangunan yg dilakukan, kemudian kalau secara tidak langsung itu kita liat dari hasil laporan-laporan yang sudah dibuat kita mengecek semuanya apakah benar atau ada yg tidak sesuai”
2.	Bahtiar Rauf Kepala Urusan Pembangunan Desa (Kaur)	<ul style="list-style-type: none">• “bentuk pengawasanya itu ya seperti biasa, di awasi pada saat pembangunan proyek yang dilakukan sama desa tentunya sama kan ada ji juga itu laporan-laporan dari pekerja proyek.”• “ya, pastilah kita melakukan pengawasan dengan benar, sudah sesuai dengan yang seharusnya karena kalau tidak diawasi dengan benar pembangunan pasti tidak berjalan

<p>3.</p> <p>Andika Aldila (TPKD pelaksana pembangunan desa)</p>		<p>dengan baik.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • “kalau kordinasi BPD dengan pemerintah desa ya adanya komunikasi antar kedua belah pihak terhadap pengawasan misalnya bekerja sama dalam pengawasan pembangunan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa tentu akan ada pemberitahuan ke pihak BPD selaku pengawas” • “untuk pengawasan langsung ya seperti tadi mengawasi pekerja proyek, mengawasi pengeluaran dan pemasukan dana desa dan masih banyak lagi, kalau secara tidak langsung bisa saja dilihat dari laporan keuangan dana desa mengenai pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.” • “sebagai pelaksana pengawasan yang kami lakukan tentu harus ketat, misalnya pengawasan langsung pada proyek pembangunan secara keseluruhan dan memastikan tidak ada kekeliruan sedikit pun pada proses pengerjaannya.” • “tentu dek, pengawasan yang dilakukan benar susai dengan yang seharusnya, karena ini pembangunan uang dari pemerintah jadi harus jelas masuk/keluaranya itu semuanya.” • “kordinasi pengawasan sesama lembaga pemerintah karena BPD memang sudah tugasnya untuk mengawasi dan kami desa yang melaksanakan pembangunan tersebut jadi kordinasi sesama lembaga pemerintah BPD dan desa itu alhamdulillah lancar dan tidak terkendala.” • “kalau pengawasan secara langsung sebagai pelaksana tentu kami mengawasi secara langsung di lapangan dan untuk secara tidak langsung ya dari laporan laporan pekerja dan
--	--	--

4.	Sulaiman Saleh (masyarakat)	<p>masyarakat seperti apa dan bagaimana keadaan dari pembangunan yang sedang dikerjakan.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • “saya juga kurang tau dek, tapi setau saya memang sudah ada pengawas untuk pembangunan yang dilakukan.” • “untuk pengawasan sudah benar atau tidak itu juga saya tidak tau dek, karena yang tau itu benarmi atau tidak sudah sesuai dengan standar atau tidak ya mereka ji karena mereka yang paham kami masyarakat kurang dilibatkan.”
5.	Zainuddin (masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • “saya tidak taumi dek untuk urusan caranya mereka mengawas bagaimana, ka kita ini masyarakatji sedangkan yang urus semua itu pemerintah.”
6.	Muhammad Ishak (masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • “saya tidak tau urusan itu dek” • “kalau dari yang saya liat pengawasannya dari pemerintah biasa ji saya liat pak desa atau ada beberapa orng biasa saya liat datang liat-liat sampai mana mi ini pembangunannya atau sekedar apa ji na kerja.” • “tidak tau kalau soal itu.”
7.	Fajar Yande	<ul style="list-style-type: none"> • “saya tidak tau tapi mungkin saja pengawasan pasti ada dari pihak desa atau BPD khususnya dalam mengawasi” • “benar tidak benar cara mereka melakukan pengawasan ya hanya mereka yang tau karena kita ini masyarakat tidak tahu menau dan seperti apa itu pengawasan yang benar

2. Teknik Pemeriksaan Dalam pengawasan

1.	<p>H. Abd. Rahman Dg. Kulle (Ketua BPD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “pasti itu dek, semua pengawasan kami lakukan akan diperiksa kembali, apakah sudah benar sesuai dengan yang seharusnya atau masih ada yang harus diperbaikilagi.” • “hambatan yang ada biasanya itu dari pembangunan-pemangunan ya paling dana yang tidak mencukupi, biasa pembangunan terhenti dikarenakan dana yang ada tidak cukup saya kira itu saja.” • “pemeriksaan yang dilakukan tentu sudah sesuai dengan standar oprasional yang berlaku untuk pengawasan.” • “kami melakukan pengawasan dan pemeriksaan sangat subjektif dek, namanya juga ini urusan pemerintah tidak ada itu sistem kerabat atau keluarga ya kalau salah harus ditindaki”
2.	<p>Bahtiar Rauf Kepala Urusan Pembangunan Desa (Kaur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “iye, kalau biasanya disini itu kalau sudah ada pengawasan dicek atau diperiksa kembali sama orang kabupaten yang langsung datang mengenai penggunaan dana desa yang digunakan dalam membangun apa saja.” • “hambatan yang biasa menjadi masalah dalam keberhasilan suatu pembangunan di desa ini itu dana yaa itu paling penting, kalau itu yang tidak ada kita biar mau bergerak kan tidak bisa dana itu adalah penggerak utama menurut saya dalam membuat sebuah pembangunan.” • “kalau untuk itu kan orang kabupaten yang langsung datang periksa kita kembali kesini mengenai pengeluaran yang dilakukan desa baik itu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saya kira mereka sudah profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa pengawasan.” • “iya semua pemeriksaan yang ada secara subjektif tidak ada itu campur tangannya siapa karena ini keluarga dengan ini. Tidak ada ji

<p>3.</p>	<p>Andika Aldila (TPKD pelaksana pembangunan desa)</p>	<p>karena kan orang inspektorat langsung yang periksa kembali semua.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • “setau saya itu dek, ada memang orang dari kabupaten semua periksa semua uang desa yang sudah dicairkan kemudian dibuatkan pertanggung jawaban dari pihak desa, jadi BPD mengawasi pembangunan di desa kemudian di periksa kembali sama orang inspektorat kabupaten.” • “hambatan atau kendala yang kita hadapi disini itu kurangnya sumber daya sarana dan prasarana membangun seperti keuangan sama kami juga ini membutuhkan partisipasinya masyarakat karena yang mau dibangun kan desa ta semua, jadi bantuan suport moral dan tenaga dari warga desa itu saya kira sangat perlu itu saja dek kendala yang saya alami sebagai pelaksana.” • “kalau itu saya kurang tau dek, tapi saya kira semua orang disini sudah melakukan yang terbaik untuk pembangunan desa kita ini, dan mereka dan mungkin dipilih kalau tidak paham dengan apa yang seharusnya menjadi tugasnya.” • “kami disini semua profesional dalam menjalankan tugas, jadi kalau pemeriksaan atau pengawasan ada yang salah pasti kami tegur tidak memandang ini siapa atau keluarganya siapa.”
<p>4.</p>	<p>Sulaiman Saleh (masyarakat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “saya tidak tau soal itu dek” • “Hambatannya kami juga tidak tau karena yang menjalankan pembangunan kan

5.	Zainuddin (masyarakat)	<p>pemerintah toh dek kami tidak terlibat.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • “kalau menurutku kalau yang periksa mereka-mereka ji saja ya pasti adalah kongkalikong antara pihak terlibat tapi kami jg tidak mau seudzon jadi dibiarkan saja begitu.” • “kurang paham saya dek urusan pemeriksaan-pemeriksaan, saya ini petani tidak tau soal begituan” • “hambatannya mungkin dana di, ka biasa kalau cerita-cerita ya mereka mengeluhkan anggarannya tidak cukup.”
6.	Muhammad Ishak (masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • “saya tidak taumi kalau soal itu, Cuma mereka yang tau kan mereka yang saling berhubungan.” • “setauku memang ada pemeriksaan dari kabupaten yang setiap akhir tahun selalu datang memeriksa, saya juga tau dari keluarga ji karena ada keluarga yang kerja dikantor desa.” • “dari yang saya dengar-dengar paling di keuangannya anggaran tidak cukuplah, karena ada pembangunan yang bersifat tiba-tiba juga.”
7.	Fajar Yande	<ul style="list-style-type: none"> • “mungkin tidak adaji, karena yang periksakan bukan ji orang desa disini melainkan dari pemerintah kabupaten langsung.” • “BPD kan sebagai pengawas desa tentu akan melakukan juga pertanggung jawaban ke daerah atau kecamatan jadi pasti akan diperiksa kembali hasil pengawasannya seperti apa.”

		<ul style="list-style-type: none"> • “saya kurang begitu tau apa kendala yang pemerintah hadapi dikarenakan kita masyarakat memang tidak terlibat apa lagi kalau mengenai anggaran karena jujur ya pemerintah desa kita ini kurang transparan.” • “kalau orang dari daerah yang melakukan pemeriksaan mungkin saja sudah subjektif tapi kalau masih orang kecamatan baru adami keluarganya saya kira hubungan kekerabatan itu sudah melekat dan pasti ada keterlibatan emosional di dalamnya.”
--	--	--

3. Teknik Penilaian dalam pengawasan

NO	INFORMAN	INDIKATOR
1.	H. Abd. Rahman Dg. Kulle (Ketua BPD)	<ul style="list-style-type: none"> • “hal yang bertentangan antara nilai pengawasan dengan pengawasan kalau menurut saya dek dari yang saya liat saya kira tidak ada ji hal-hal yang bertentangan semua kita sudah lakukan dalam mengawasi secara baik dan benar.” • “saya kurang tau ya kalau masyarakat seperti apa penilaiannya kepada kami sebagai pengawas, karena orang kan berbeda-beda sudut pandangnya tapi kalau pro kontra pasti adalah.” • “kami BPD sudah bekerja dengan mengawasi segala pelaksanaan pemerintahan dan segala aturan desa baik itu pembangunan maupun segala kegiatan yang dilakukan desa dan dilakukan secara adil, jujur dan berdasarkan kebenaran.
2.	Bahtiar Rauf Kepala Urusan	<ul style="list-style-type: none"> • “kalau itu saya kira dak ada ji dek hal-hal yang bertentangan pada nilai-nilai pengawasan yang dilakukan selama ini kami masih dalam

	<p>Pembangunan Desa (Kaur)</p>	<p>konteks yang amanji .”</p> <ul style="list-style-type: none"> • “dari beberapa masyarakat yang saya temui penilaiannya masyarakat dengan pengawasan yang di lakukan oleh BPD maupun perangkat desa tidak adaji masalah dek juga.” • “penilaian memang harus adil, jujur dan berdasarkan kebenaran, insya allah kami semua juga sedang menerapkan hal demikian dek.”
<p>3.</p>	<p>Andika Aldila (TPKD pelaksana pembangunan desa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “sayakan dibagian teknik pelaksanaan jadi saya kurang paham itu dek kalau soal yang seperti itu, tapi selama ini berjalan ji semua dengan baik, menurut saya ini mungkin tidak adaji masalah apa lagi hal-hal yang bertentangan.” • “penilaiannya masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan BPD juga tidak ada ji masalah karena masyarakat tidak terlalu peduli ji sama urusan pemerintahan.” • “selama saya menjadi TPKD disini juga alhamdulillah tidak adaji masalah apalagi kita semua sudah baku kenal baik jadi saling percaya insya allah untuk itu semua kita sudah terapkan semua.”
<p>4.</p>	<p>Sulaiman Saleh (masyarakat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “saya juga tidak tau soal itu dek” • “kami dari masyarakat sebenarnya tidak pernah di suruh untuk menilai tapi saya kira ini kesadarannya saja masyarakat, jujur saja saya tidak terlalu perhatikan bagaimana cara pengawasannya BPD selama ini juga dek karena kita liatmi sendiri masyarakat adami sibuk bertani, berkebun, sibuk dengan pekerjaannya jadi untuk yang seperti itu kurang

5.	Zainuddin (masyarakat)	<p>paham dan mungkin tidak mau paham.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • “itu urusannya pemerintah dek saya tidak tau itu apa-apa saja soal penilaian pengawasan.” • “sebagai masyarakat sendiri saya saja tidak tau mau menilai ini seperti apa, sudah baikkah, belumpikah karena memang masyarakat tidak dilibatkan mungkin ada beberapa dilibatkan karena ada kepentingan dan sebagainya.”
6.	Muhammad Ishak (masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • “tidak tau ka dek” • “BPD jarang di sorot dimasyarakat jadi BPD yang saya liat itu dek ada tapi kayak tidak ada, ada namanya ada kalau pertemuan tapi saya tidak pernah liat dan jelas apa sebenarnya yang mereka kerja.”
7.	Fajar Yande	<ul style="list-style-type: none"> • “kalau pertanyaan ini dek yang bisa jawab Cuma pemerintah tapi pasti mereka jawabnya tidak adak yang bertentangan tapi saya yakin pasti ada apa lagi kita tau dalam pemerintahan itu tidak lepas dari yang namanya ketidakjujuran.” • “penilaiannya masyarakat pasti beda-beda, tapi kalau saya BPD selama ini yang saya liat secara kasat mata datang ji ngopi dikantor baru absen kalau sudah pulangmi.”

4) Faktor yang mempengaruhi Pengawasan

NO	INFORMAN	INDIKATOR
1.	H. Abd. Rahman Dg. Kulle (Ketua BPD)	<ul style="list-style-type: none"> • “kalau faktor penghambatnya pengawasan ini yang saya liat, sumber daya manusia yang kita miliki ini sebenarnya banyak tapi tidak semua sumberdaya manusia di desa ini mampu menjalankan tugas dikarenakan wawasan yang dimiliki dan tingkat pendidikan di sini tidak semua tinggi, kemudian prasarana untuk badan permusyawaratan desa tidak seperti desa kami disini serba mengalami keterbatasan. • “untuk faktor pendorong dalam sebuah pengawasan menurut saya secara pribadi ada tanggung jawab, yang mengharuskan kami mengerjakan karena memang ini adalah tugas kami, kemudian kalau ada pembangunan yang infrastruktur yang tersendatkan pasti masyarakat desa akan bertanya ke kami, kenapa itu tidak berjalan, apa kendalanya tidak berjalan itu pembangunan dan sebagainya.” • “masyarakat menurut saya dek, ya terlibat secara tidak langsung, karenaseperti yang saya bilang tadi kalau ada sesuatu yang terjadi masyarakatkan taunya yang bertanggung jawab atas pengawasan pembangunan infrastruktur desa adalah BPD jadi kalau sesuatu terjadi di pembangunan masyarakat tentu akan menyoroti kami.
2.	Bahtiar Rauf Kepala Urusan Pembangunan Desa (Kaur)	<ul style="list-style-type: none"> • “dari yang saya tau ini paling sarana dan prasarana mungkin yang kurang, fasilitas pengawas yang terbatas kemudian pengawas jadi terkendala atau malas menjalankan tugasnya.” • “kalau untuk itu saya juga kurang tau, tapi pendorongnya bisa karena memang kebutuhan dan tugas saja dan insentif yang diberikan dari hasil pengawasan tersebut.” • “memberikan dampak, karena kalau tidak ada

3.	Andika Aldila (TPKD pelaksana pembangunan desa)	<p>pengawasan kemudian terjadi kesalahpahaman masyarakat ujung-ujungnya pasti protes.”</p> <ul style="list-style-type: none">• “penghambatnya pengawasan yang saya liat disini itu kurangnya kesadaran pada tugas yang diberikan, jadi biasa anggota BPD ini datanggi absen kekantor terus selesai mereka kabur pulang tidak na lanjutmi lagi kegiatannya.• “kalau untuk faktor pendorong saya kurang tau dek, apa pendorongnya sehingga ini pengawasan menjadi baik• “sebenarnya masih ada beberapa masyarakat yan peduli dengan pembangunan infrastruktur jadi masyarakat ini setidaknya memberikan pengaruh dari kinerja pengawasan dan juga pembangunan infrastruktur desa.
----	--	---

BIODATA PENELITI



ZulFadli Harjun dilahirkan di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada hari sabtu tanggal 7 januari tahun 1995. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Harrang dan Ibu Junaeda memiliki 2 saudara perempuan yang bernama Hasna anak pertama dan Hajra anak kedua. Peneliti masuk sekolah dasar di SDN 204 Batuara di Kabupaten Bulukumba dan lulus pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Bantaeng lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di tahap selanjutnya pada SMA Negeri 2 Bulukumba yang kini dikenal sebagai SMAN 8 Model Bulukumba dan lulus pada tahun 2013. Sempat menganggur selama 1 tahun untuk membantu kedua orang tua bertani. kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”